

Pola Kebijakan Fiskal di ASEAN: Kontrasiklikal atau Prosiklikal?

Raisa Fitriani *

* Penulis korespondensi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Abstract

JEL Classification Code:
B320, E620, E630.

Kata kunci:
Kebijakan Fiskal, Pola Kebijakan Fiskal, Kebijakan stabilisasi, Kontrasiklikal, Prosiklikal

Email penulis:
2015110004@student.unpar.ac.id*

Fiscal policy is implemented by the government to influence the real sector through taxes and spending. Furthermore, government use It to mitigate the impact of the current business cycle in a country's economy (boom or depression) so fiscal policy indicates the government's commitment as an economic stabilizer. Referring to theory, fiscal policy should be countercyclical. However, it is possible that fiscal behavior is procyclical. This study determines the behavior of fiscal policy in ASEAN in the 2001-2018 period using the Panel Least Square (PLS). We estimate three models of fiscal behavior to examine the fiscal pattern. The estimation results show that the pattern of fiscal policy in ASEAN is countercyclical for models based on government revenue and fiscal balance, while model based on government revenue is procyclical.

Abstrak

Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi sektor riil melalui pajak dan pengeluaran. Selanjutnya, pemerintah menggunakannya untuk memitigasi dampak siklus bisnis saat ini dalam perekonomian suatu negara (boom atau depresi) sehingga kebijakan fiskal menunjukkan komitmen pemerintah sebagai stabilisator ekonomi. Mengacu pada teori, kebijakan fiskal seharusnya bersifat countercyclical. Namun, ada kemungkinan bahwa perilaku fiskal bersifat prosiklikal. Studi ini mengetahui perilaku kebijakan fiskal di ASEAN periode 2001-2018 dengan menggunakan Panel Least Square (PLS). Kami memperkirakan tiga model perilaku fiskal untuk memeriksa pola fiskal. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pola kebijakan fiskal di ASEAN adalah countercyclical untuk model yang berbasis pendapatan pemerintah dan perimbangan fiskal, sedangkan model yang berbasis pendapatan pemerintah bersifat procyclical.

Pendahuluan

Global financial crisis (GFC) pada tahun 2008, menjadi titik balik bagi berbagai negara dalam mempertimbangkan peran kebijakan fiskal terhadap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Sebelum GFC terjadi, banyak negara yang menggunakan kebijakan moneter sebagai acuan dalam penanggulangan krisis karena dianggap lebih efektif. Tetapi, kondisi yang terjadi berbeda ketika kebijakan moneter menghasilkan hasil yang kurang efektif dalam memitigasi dampak buruk GFC tahun 2008. Ketika banyak negara menggunakan kebijakan fiskal (ekspansif) untuk mengatasi dampak buruk GFC, ternyata sektor riil merespon baik kebijakan fiskal stimulus tersebut sehingga dapat melakukan aktifitas ekonomi pada saat itu. Semenjak kejadian tersebut, pemerintah di berbagai negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai alternatif kebijakan makroekonomi dalam mengintervensi kegiatan masyarakat di sektor riil.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mengintervensi kegiatan ekonomi di sektor riil. Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan fiskal dapat memengaruhi aktivitas perekonomian keseluruhan secara langsung. Alat kebijakan fiskal yang umum diaplikasikan dalam mengintervensi sektor riil adalah melalui penerimaan, pengeluaran, dan *budget balances* pemerintah. Dalam implementasinya, pemerintah akan menghargai siklus bisnis yang sedang terjadi, sehingga kebijakan fiskal yang ditetapkan dapat menstabilkan kondisi di sektor riil.

Berdasarkan teori, siklus bisnis memiliki dua kondisi ekstrim yaitu terjadi ketika *boom* dan *recession*. Keynesian *theory* mempertimbangkan fluktuasi siklus bisnis dalam merekomendasikan kebijakan fiskal yang akan ditetapkan. Fluktuasi dalam siklus bisnis tersebut, menjadi dasar Keynesian dalam pernyataannya bahwa diperlukan kebijakan fiskal untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim siklus bisnis di suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki kekuatan lebih dalam menstabilisasi keadaan ekonomi di suatu negara (Bilgili, 2001). Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan siklus bisnis untuk memperhalus dampak dari kondisi (*boom/recession*) yang sedang terjadi (Fatas dan Mihov, 2003).

Peran pemerintah dalam menstabilkan keadaan di sektor riil melalui kebijakan fiskal tidak akan terwujud jika diimplementasikan tanpa memperhatikan siklus bisnis. Dengan begitu, dapat diindikasikan bahwa kebijakan fiskal memiliki pola tertentu dalam mengintervensi sektor riil. Secara umum, pola kebijakan fiskal dibagi menjadi dua kriteria yaitu kontrasiklikal dan prosiklikal. Pola kontrasiklikal terjadi ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya dan meningkatkan pengenaan pajak masyarakat ketika *boom*; dan sebaliknya ketika *recession*.

Kebijakan fiskal yang ditetapkan seharusnya memiliki pola kontrasiklikal, jika mengacu pada teori ekonomi. Namun, kenyataannya pola tersebut tidak selalu terjadi akibat beberapa faktor. Menurut Riasecos dan Vegh (2003), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pola kebijakan fiskal di suatu negara, antara lain tekanan politik dan hilangnya akses terhadap pasar internasional. Walau begitu, faktor-faktor tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda di setiap negara, sehingga menghasilkan pola kebijakan fiskal yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya menunjukkan jika kebijakan fiskal yang memiliki pola prosiklikal banyak terjadi di negara berkembang, sedangkan di negara maju lebih condong memiliki pola kontrasiklikal (Woo, 2005). Tetapi, pola kontrasiklikal atau prosiklikal dari kebijakan fiskal dapat terjadi pada berbagai macam negara (Woo, 2005 dan Alesina et al., 2008). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pola kebijakan fiskal di 10 negara ASEAN. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya studi yang membahas perilaku kebijakan fiskal dalam mempengaruhi siklus bisnis.

Landasan Teori dan Tinjauan Literatur

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat pemerintah dalam mengintervensi sektor riil melalui penetapan pengenaan pajak (pendapatan pemerintah), belanja pemerintah untuk penyediaan dan pelayanan publik (pengeluaran pemerintah), serta keseimbangan fiskal pemerintah (*surplus* atau *deficit*). Kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga kondisi (stabilisasi) sektor riil, tanpa melupakan siklus bisnis yang terjadi. Kebijakan fiskal memiliki peran penting sebagai alat pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi efek berlebihan dari siklus bisnis yang sedang terjadi (Bogdanov, 2010).

Secara umum, pola kebijakan yang berlaku di suatu negara menggambarkan respon dari kebijakan fiskal terhadap kondisi sektor riil dalam suatu perekonomian negara. Kebijakan fiskal dikatakan optimal jika mampu meredam/memperhalus siklus bisnis yang terjadi pada kondisi tertentu. Berdasarkan teori, kondisi optimal tersebut terjadi ketika kebijakan fiskal memiliki pola kontrasiklikal. Pola kontrasiklikal tersebut terjadi ketika pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pengenaan pajak ketika *boom*, dan sebaliknya.

Kenyataannya, selain terdapat pola kontrasiklikal, pola kebijakan fiskal di suatu negara juga dapat berlaku prosiklikal. Kondisi prosiklikal, secara singkat merepresentasikan respon kebijakan fiskal yang mengikuti siklus bisnis. Pola ini ditandai dengan terjadinya kenaikan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pengenaan pajak ketika *boom*, dan sebaliknya. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah mendukung kondisi siklus bisnis di sektor riil yang sedang terjadi.

Penelitian Riascos dan Vegh (2003) memiliki tujuan untuk memperjelas perdebatan mengenai pola kebijakan fiskal di negara berkembang dan negara G7 pada tahun 1970-1994. Penelitian ini didasari oleh ketidaksesuaian teori mengenai pola kebijakan fiskal terjadi pada negara-negara G7 yang memiliki pola siklikal. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya yang mayoritas menyatakan bahwa pola kebijakan fiskal di negara berkembang tidak sesuai dengan teori ekonomi (prosiklikal) juga menjadi landasan utama peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan jika pola kebijakan fiskal di negara berkembang adalah prosiklikal dan negara-negara G7 adalah benar asiklikal.

Penelitian Woo (2005) bertujuan untuk melihat apakah pola kebijakan fiskal di 96 negara maju dan berkembang pada tahun 1960-2001. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola kebijakan fiskal yang berlaku adalah prosiklikal. Pembahasan dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa kondisi prosiklikal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Menurutnya, negara yang memiliki pola prosiklikal dianggap lebih agresif dalam merespon siklus bisnis yang berlangsung.

Penelitian Bogdanov (2010), bertujuan untuk mengetahui pola kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal sebagai *automatic stabilizers* atau *discretionary fiscal policy*, serta mengetahui efek dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan output di negara maju dan negara berkembang (G20). Bogdanov (2010) membagi sampel yang digunakan menjadi dua kelompok negara (maju dan berkembang) untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pola kebijakan fiskal di negara maju adalah kontrasiklikal, sedangkan untuk di negara berkembang adalah asiklikal. Tidak signifikannya siklus bisnis di sektor riil terhadap kebijakan fiskal pemerintah menjelaskan bahwa ketika kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah tidak menstabilkan atau mendukung siklus bisnis di negara terkait (Kaminsky et al., 2004 dalam Nizar, 2011). Pola kebijakan asiklikal ini juga seringkali dikaitkan dengan pola kebijakan fiskal berdasarkan pandangan Barro yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan fiskal yang ditetapkan tidak berubah-ubah agar tidak menghasilkan *shock* baru di sektor riil.

Pola kebijakan fiskal menggambarkan perilaku kebijakan fiskal dalam merespon kondisi ekonomi di sektor riil akibat adanya siklus bisnis. Terdapat beberapa pola kebijakan fiskal yang dapat terjadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara terkait. Secara umum pola tersebut dibedakan menjadi pola kontrasiklikal dan prosiklikal. Kebijakan fiskal yang memiliki pola kontrasiklikal terjadi ketika kebijakan yang ditetapkan dapat meredam atau menstabilisasi siklus bisnis yang terjadi di sektor riil. Artinya, pemerintah akan mengurangi pengeluarannya dan meningkatkan pengenaan pajak masyarakat ketika siklus bisnis berada di masa boom. Sedangkan ketika resesi, pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya dan mengurangi pengenaan pajak masyarakat.

Pola kebijakan fiskal yang prosiklikal merupakan kebijakan yang cenderung lebih mengikuti/mendukung siklus bisnis yang terjadi. Artinya adalah pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya dan mengurangi pengenaan pajak terhadap masyarakat ketika boom. Sebaliknya ketika sektor riil sedang berada di kondisi resesi, pemerintah cenderung akan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pengenaan pajak. Selain pola kontrasiklikal dan prosiklikal, kebijakan fiskal juga bisa saja memiliki pola asiklikal. Pola asiklikal tersebut dapat terjadi jika kebijakan fiskal yang ditetapkan (pengeluaran atau pengenaan pajak) adalah konstan. Artinya kebijakan fiskal yang ditetapkan tidak berdasarkan kondisi sektor riil yang dipengaruhi siklus bisnis.

Berdasarkan teori ekonomi dari sudut pandang Keynesian, kebijakan fiskal disarankan memiliki pola kontrasiklikal dibandingkan dengan pola lainnya. Hal tersebut karena pola kebijakan yang kontrasiklikal, dianggap lebih bisa memitigasi dampak buruk dari siklus bisnis yang terjadi di sektor riil. Selain itu, pola ini juga dapat menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat pencegahan sehingga ekonomi tidak berada di kondisi ekstrim (boom maupun recession). Tetapi kenyataannya, pola kebijakan fiskal tidak selalu terjadi sesuai dengan teori ekonomi. Ketika terjadi berbeda dengan teori, faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah tekanan politik atau kendala akses pasar keuangan ketika resesi di suatu negara (Riascos dan Vegh, 2003).

Metode Penelitian

Penelitian ini mencakup 10 negara ASEAN yaitu Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Data yang digunakan adalah data tahunan 2001-2018.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel *dependent* dan variabel *independent*. Karena penulis menggunakan 3 model, maka penelitian ini memiliki tiga variabel dependent yang berbeda. Untuk persamaan pertama, dependent variabelnya adalah pertumbuhan dari pendapatan pemerintah. Kedua, variabel dependent yang digunakan adalah pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Terakhir atau persamaan ketiga, dependent variabel penelitian ini adalah keseimbangan fiskal. Walaupun memiliki tiga variabel dependent yang berbeda, variabel independent yang digunakan adalah sama yaitu pertumbuhan PDB riil per kapita untuk ketiga persamaan yang digunakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan 10 negara ASEAN dalam penelitian ini.¹ Data-data setiap variabel yang digunakan merupakan data sekunder yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk pertumbuhan oleh penulis, yaitu: (i) total pendapatan negara; (ii) total pengeluaran negara; (iii) Produk Domestik Bruto (PDB) riil; dan (iv) populasi yang bersumber dari *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund*.²

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem persamaan linier berganda. Persamaan regresi menggunakan alat analisis *Panel Least Square* (PLS). Sebelum melakukan estimasi, penulis melakukan uji model terhadap masing-masing model yang digunakan sehingga mendapatkan model terbaik pada penelitian ini. Hasil yang didapatkan dari uji Chow dan uji Hausman untuk ketiga model yang digunakan adalah: (i) model 1 (pendekatan pendapatan pemerintah), model yang baik untuk digunakan adalah *common effect model* (CEM); (ii) model 2 (pendekatan pengeluaran pemerintah) dan model 3 (pendekatan keseimbangan fiskal) adalah *fixed effect model* (FEM). Setelah mendapatkan referensi penggunaan model untuk setiap persamaan yang digunakan, penulis melakukan uji asumsi klasi terhadap masing-masing model agar hasil estimasi yang dilakukan dapat dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Peneliti mengacu pada model yang dibentuk oleh Bogdanov (2010) mengenai pola kebijakan fiskal. Terdapat beberapa variabel fiskal yang digunakan Bodagnov (2010) antara lain pendapatan negara, pengeluaran negara, dan keseimbangan fiskal (*budget balance*). Variabel-variabel tersebut dipilih karena merupakan proksi yang tepat untuk melihat perilaku fiskal di suatu negara (Bogdanov, 2010). Bogdanov (2010) menggunakan pendekatan per kapita terhadap variabel fiskal yang digunakannya. Hal tersebut dilakukan karena menurutnya, pendekatan perkapita akan memberikan pandangan aktual perihal bagaimana peran pemerintah dapat memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, penggunaan PDB riil per kapita dianggap lebih baik untuk dijadikan proksi *standards of living* negara yang digunakan dalam penelitian. Dengan begitu, penggunaan pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih realistis dan komprehensif mengenai peran pemerintah melalui kebijakannya terhadap perekonomian (dalam kasus ini adalah sektor riil) di suatu negara.

Dalam proses pembentukan model, terdapat pertimbangan bahwa belum ada teori yang menjelaskan arah hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan keterbatasan tersebut, Bogdanov (2010) mengasumsikan jika pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan memengaruhi pola sikikalitas kebijakan fiskal yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, Bogdanov (2010) membentuk tiga model yang dibedakan berdasarkan variabel fiskal yang digunakan:

$$GRGREV_{i,t} = \alpha + \beta_1 GRGDPRC_{i,t} + u_{i,t} \quad (1)$$

$$GRGEX_{i,t} = \alpha + \beta_2 GRGDPRC_{i,t} + u_{i,t} \quad (2)$$

¹ 10 negara ASEAN yang digunakan adalah Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

² Konversi data kedalam bentuk pertumbuhan dilakukan terhadap beberapa variabel yang digunakan sesuai kebutuhan penulis (sesuai dengan model penelitian yang dijelaskan pada bagian selanjutnya).

$$\left(\frac{G-T}{GDP}\right)_{i,t} = \alpha + \beta_3 GRGDPRC_{i,t} + u_{i,t} \tag{3}$$

dengan $GRGREV_{i,t}$ adalah pertumbuhan pendapatan pemerintah per kapita (%), $GRGEX_{i,t}$ adalah pertumbuhan pengeluaran pemerintah per kapita (%), $T_{i,t}$ adalah pendapatan pemerintah (LCU), $G_{i,t}$ adalah pengeluaran pemerintah (LCU), $GRGDPRC_{i,t}$ adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil per kapita (%), dan $GDP_{i,t}$ adalah Produk Domestik Bruto riil (US\$)

Model pertama merupakan pendekatan yang dibentuk berdasarkan variabel fiskal pendapatan pemerintah. Sedangkan untuk model kedua, variabel fiskal yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah dan model ketiga ada pendekatan keseimbangan fiskal. Koefisien β_1 , β_2 , dan β_3 (sesuai urutan) pada model (1), (2), dan (3) nantinya akan menunjukkan pola siklikalitas kebijakan fiskal pada negara yang diteliti (Tabel. 1).

Tabel 1. Siklikalitas Kebijakan Fiskal

Koefisien β_1	Kontrasiklikal	Prosiklikal
Pers. (1)- pendapatan pemerintah	(+)	(-)
Pers. (2)- pengeluaran pemerintah	(-)	(+)
Pers. (3)-keseimbangan fiskal	(-)	(+)

Kebijakan fiskal suatu negara memiliki perilaku kontrasiklikal jika pertumbuhan GDP per kapita berhubungan positif dengan pertumbuhan penerimaan pemerintah; atau hubungannya negatif terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal memiliki perilaku prosiklikal jika pertumbuhan GDP per kapita berhubungan negatif dengan pertumbuhan penerimaan pemerintah; atau hubungannya positif terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Perilaku kebijakan fiskal dapat dikatan asiklikal (tidak memiliki pola) jika tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hasil pengolahan data pada persamaan (1), (2), atau (3).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan pendekatan pendapatan pemerintah (Tabel. 2) yang dilakukan, dapat dilihat jika kebijakan fiskal di ASEAN memiliki pola kontrasiklikal. Setiap peningkatan GDP riil per kapita sebesar 1%, menghasilkan kenaikan pendapatan pemerintah per kapita sebesar 1,25%. Artinya, ketika sektor riil di ASEAN berada di kondisi *good times*, pemerintah akan mengalami kenaikan pendapatan. Hal tersebut terjadi sesuai prinsip dasar pola kebijakan fiskal yang kontrasiklikal, yaitu pemerintah akan menerima pendapatan pajak lebih banyak ketika *good times* akibat ditingkatkannya pengenaan pajak. Dilakukannya perdagangan internasional (dalam kasus ini adalah ekspor) dan kemudahan investasi antar negara anggota ASEAN juga menjadi salah satu sumber pendapatan lainnya. Kemudahan ekspor dan investasi dapat berkontribusi dalam penambahan jumlah pengenaan pajak yang ditetapkan (ASEAN *Secretariat*, 2017). Kegiatan lain seperti pengampunan pajak yang dilakukan pada periode penelitian juga dapat menjadi salah satu faktor mengapa pola kebijakan fiskal di ASEAN adalah kontrasiklikal. Di sisi lain, pemerintah juga mengurangi atau membatasi pengeluarannya (kebijakan kontraktif) sehingga dapat menekan kegiatan ekonomi di sektor riil (agar tidak *boom*). Dengan begitu, peran pemerintah sebagai stabilitor sektor riil di ASEAN pada periode penelitian telah tercapai.

Tabel 2. Pendekatan Pendapatan Pemerintah

Dependent variable= GRGREV		
Independent variable	Coefficient	Prob.
Konstanta	-0,005278	0,7473
GRGDPRC	1,258201	0,0000
R ² = 0.362941		

Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan pendekatan pengeluaran pemerintah (Tabel. 3)

menunjukkan pola kebijakan fiskal yang prosiklikal, hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Jika diinterpretasikan, setiap peningkatan GDP riil per kapita sebesar 1%, menghasilkan kenaikan pengeluaran pemerintah per kapita sebesar 0.33%. Artinya, pengeluaran pemerintah pada kondisi *good times* akan mengalami peningkatan, dan pengenaan pajak (cenderung) diturunkan. Secara umum pengeluaran pemerintah ASEAN pada periode penelitian sedang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun akibat fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak lain untuk memitigasi dampak dari permasalahan global seperti ketidakpastian perdagangan internasional (di luar ASEAN) dan tekanan politik yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi di sektor riil (ASEAN Secretariat, 2017).

Tabel 3. Pendekatan Pengeluaran Pemerintah

Dependent variable= GRGEX		
Independent variable	Coefficient	Prob.
Konstanta	0,069904	0,0000
GRGDPRC	0,339731	0,0012
R ² = 0,305102		

Dari sudut pandang lain, kebijakan moneter yang dilakukan oleh mayoritas negara ASEAN memicu terjadinya *capital outflow* yang berpotensi untuk mendepresiasi mata uang domestik (ASEAN Secretariat, 2018). Dengan kondisi seperti itu, pemerintah perlu melakukan pengeluaran lebih untuk menciptakan insentif baru guna menarik investasi ke dalam negeri (di masing-masing 10 negara ASEAN).

Tabel 4. Pendekatan *Budget Balances*

Dependent variable= BUDBAL		
Independent variable	Coefficient	Prob.
Konstanta	0,034417	0,0000
GRGDPRC	-0,228265	0,0000
R ² = 0,345180		

Terakhir adalah pendekatan *budget balances*, menunjukkan hasil yang sama dengan pendekatan pertama (pendapatan pemerintah) yaitu kebijakan fiskal di ASEAN memiliki pola kontrasiklikal. Setiap peningkatan GDP riil per kapita sebesar 1%, menghasilkan pengurangan defisit keseimbangan pemerintah sebesar 0.22%. Artinya, jika sektor riil sedang berada di kondisi *good times*, defisit pemerintah mengalami penurunan. Penurunan defisit ini terjadi karena upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal di masing-masing negara. Berbagai faktor yang telah berkontribusi dalam pengurangan defisit oleh masing-masing negara ASEAN antara lain kualitas kredit (untuk akses internasional) membaik, melakukan ekspor di sektor-sektor unggulan sehingga memperoleh pendapatan, pemanfaatan potensi sektor wisata yang dimiliki di berbagai negara ASEAN, serta pengelolaan pengenaan pajak yang lebih baik (OECD, 2018). Dengan upaya-upaya tersebut, pola kebijakan ASEAN berdasarkan pendekatan keseimbangan fiskal adalah kontrasiklikal.

Estimasi yang dilakukan menghasilkan pola kebijakan fiskal yang berbeda-beda untuk setiap pendekatan. Untuk pendekatan pendapatan dan keseimbangan pemerintah adalah kontrasiklikal, sedangkan pendekatan pengeluaran pemerintah prosiklikal. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka pola kebijakan fiskal di ASEAN dapat berbeda-beda sesuai dengan alat kebijakan fiskal yang dipilih oleh pemerintah terkait.

Kesimpulan dan Implikasi

Mengacu pada teori ekonomi, kebijakan fiskal di suatu negara ditetapkan dengan menghargai adanya siklus bisnis. Kondisi tersebut menciptakan adanya pola dari kebijakan fiskal dalam mengintervensi sektor riil di suatu negara. Berdasarkan teori, kebijakan fiskal seharusnya memiliki

pola kontrasiklikal. Dengan pola tersebut, kebijakan fiskal dapat menstabilisasi siklus bisnis yang terjadi di sektor riil suatu negara. Tetapi pada kenyataannya, pola kebijakan tersebut dapat terjadi sebaliknya (prosiklikal) atau bahkan tidak menstabilkan/mendukung sektor riil (asiklikal). Penggunaan data panel bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola kebijakan fiskal yang terjadi di ASEAN pada periode 2001-2018. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, terdapat perbedaan hasil estimasi yang menunjukkan pola kebijakan fiskal yang berbeda juga sesuai dengan pendekatan (model) yang digunakan. Dalam persamaan 1 yaitu pendekatan pendapatan pemerintah, pola kebijakan fiskal secara umum adalah kontrasiklikal. Persamaan 2 yaitu pendekatan pengeluaran pemerintah, pola kebijakan fiskal yang teridentifikasi adalah prosiklikal. Terakhir yaitu persamaan 3 (pendekatan keseimbangan fiskal) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di ASEAN memiliki pola kontrasiklikal. Secara umum, faktor yang memengaruhi pola kebijakan fiskal adalah tekanan politik, ketidakpastian perdagangan dan investasi, serta ketidakpastian fiskal. Sedangkan berdasarkan faktor yang memengaruhi pola kebijakan fiskal secara regional adalah sistem fiskal yang berlaku serta kemampuan negara terkait dalam menghadapi faktor-faktor global yang sedang terjadi (ASEAN Secretariat, 2017; ASEAN Secretariat, 2018; dan OECD, 2018). Dengan begitu, pola kebijakan fiskal yang berlaku di ASEAN didasari oleh alat kebijakan fiskal yang dipilih (hasil ketiga model berbeda-beda).

Daftar Pustaka

- Alesina, A., Campante, F. R., & Tabellini, G. (2008, September). Why is fiscal policy often procyclical? *Journal of the European Economic Association*, 6(5), 1006-1036.
- ASEAN Secretariat. (2017). *ASEAN economic integration brief*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2018). *ASEAN economic integration brief*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bilgili, F. (2001). The keynesian-monetarist debate on business cycles: a case study of the great depression. *Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, 17, 54-71.
- Bogdanov, B. (2010). *Cyclical policy over the business cycle: an empirical study on developed and developing countries*. Bulgaria: Agency for Economic Analysis and Forecasting.
- Fatas, A., & Mihov, I. (2003). Fiscal policy and business cycles: an empirical investigation. *INSEAD dan CERP*.
- Nizar, M. A. (2011). Siklikalitas kebijakan fiskal di indonesia. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 14(1), 55-82.
- OECD. (2018). *Economic outlook for southeast asia, china, and india 2018: fostering growth through digitalisation*. OECD Development centre. Paris: OECD Publishing.
- Riascos, A., & Vegh, C. A. (2003, October). *Procyclical government spending in developing countries: the role of capital market imperfections*. Colombia.